PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN BUTON

Nining Asniar Ridzal

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia.

E-mail: ningasniaridzal84@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Jenis penelitian adalah deskriptif. Data penelitian adalah data primer. Instrumen penelitian berupa kuisioner. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sampel penelitian berjumlah 35 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan metode sensus. Data penelitian dianalisis menggunakan statistik inferensial dengan model regresi sederhana yang didahului oleh uji linearitas dan normalitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < \alpha$ sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Hal ini berarti bahwa baik tidaknya akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Kata Kunci: Kualitas, Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Kinerja

THE EFFECT OF QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON ACCOUNTABILITY OF PERFORMANCE IN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) BUTON DISTRICT

Abstract

This research aims to know the influence of financial statement quality to performance accountability in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Type of research is descriptive. Data of research is primary data. Research instrument is questionnaire. Population of this research is all the people on Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sample of this research is 35 people. The sampling technique use non probability sampling with sensus method. Research data was analyzed using inference statistik with a simple regression model that was preceded by a linearity and normality test. Results of data analysis show that the significance value is 0,000 below the α of 0,05, it can be concluded that financial statement quality give positive and significant influence to performance accountability at Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buton District. It show that good or no the performance accountability of government agency influenced of financial statement quality produced.

Keywords: *Quality, Financial Statements, Accountability, Performance*

Article History: Received: 02 Mei 2020 Revised: 20 Mei 2020 Accepted: 29 Mei 2020

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang mengacu pada UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan dua keterkaitan strategis yaitu *pertama*, masyarakat daerah diberikan wewenang lebih besar untuk memilih arah, kebijakan, tujuan serta program hingga kegiatan oleh organisasi pemerintah dalam melayani masyarakat. *kedua*, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh, mengatur, dan mengalokasi dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat mulai dari daerah hingga SKPD yang ada dibawahnya. (www.dpr.go.id, 2004)

Saat ini kinerja pemerintah daerah masih menjadi perhatian publik karena masyarakat belum merasakan dampak yang baik. Namun dengan terwujudnya konsep otonomi pemerintahan daerah, memberikan harapan baru kepada masyarakat agar pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (husaini, lucy aditya, 2013).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010).

Adanya Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah guna menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemerintahan sebagai organisasi yang melayani masyarakat, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Saat ini salah satu hal yang dianggap penting adalah

keikutsertaan dalam membentuk pemerintahan yang baik. Pengelolaan pemerintahan daerah yang akuntabel, tidak terlepas dari pengelolaan APBD, Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah, dimana hal tersebut berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sakti & Masitoh, 2018)

Komponen yang penting dalam menciptakan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik adalah dengan penyusunan laporan keuangan sektor publik. Pembuatan laporan keuangan yang tepat merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah akibat aktivitas pengelolaan sumber daya publik (S.C. Darwanis, 2013). Oleh karena itu, kewajiban dari instansi pemerintah adalah mengelolakeuangan serta mempertanggung jawabkan penggunaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan karena laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintahan diwujudkan ke dalam LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan laporan yang memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah kepada publik selama satu tahun anggaran. Setiap rupiah uang publik yang telah diberikan untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah (Mursyidi, 2013). Apabila

pemerintah daerah tidak mampu memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara transparan, relevan, handal, sederhana, dan dapat dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya, maka akan muncul masalah akuntabilitas publik. Hal ini sesuai pendapat (Mahmudi, 2010) yang menyatakan ketidakpahaman masyarakat atas laporan kinerja yang disajikan oleh pemerintah maka akan menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan adanya transparansi dan penjelasan yang benar dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Bentuk transparansi dalam organisasi pemerintahan adalah dengan memberikan informasi keuangan secara transparan dan benar kepada masyarakat.

Asian Development Bank, 2000 dalam (Kharisma, 2014) mengemukakan terdapat empat prinsip utama dalam *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban dan kesetaraan dan kewajiban. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban suatu instansi / perusahaan sehingga pengelolaan instansi atau perusahaan berjalan dan terlaksana secara efektif.

Penelitian ini sejalan dengan (Kurniawati, 2016) yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, (Hehanussa, 2015) bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dimana penyajian laporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

LANDASAN TEORI

Laporan Keuangan

Laporan keuangan dalam akuntansi sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas. Laporan keuangan merupakan penyajian yang sistematis tentang posisi keuangan dan kinerja suatu entitas (Hans Kartikahadi et al, 2012) Informasi akuntansi yang terutama ditujukan kepada pihak eksternal suatu perusahaan atau organisasi disebut Laporan Keuangan (Mardiasmo, 2014).

Laporan keuangan merupakan laporan hasil (*output*) sedangkan masukannya (*input*) berupa transaksi bisnis. Supaya masuk ke dalam sistem pencatatan, maka keseluruhan input harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi (Toto Prihadi, 2013). Laporan keuangan yang tepat telah menjadi komponen kunci dimana akuntabilitas diharapkan dan dapat ditunjukkan. Penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan oleh stakeholder Melalui laporan keuangan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah informasi kuantitatif tentang posisi keuangan secara tertulis dari suatu entitas pelaporan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik berperan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas.

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Informasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yakni memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, Tepat waktu, lengkap.

2. Andal

Informasi dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut mempunyai potensi menyesatkan. Informasi dikatakan andal apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut : Penyajian jujur, Dapat diverifikasi, Netral

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi dimaksud.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Mahmudi, 2010).

Menurut (Halim dan Kusufi, 2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas tidak hanya sebatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai upaya dalam pemberantasan korupsi, dan upaya untuk menguatkan akuntabilitas merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dwi Afriyanti, Harpanto Guno Sabanu, 2015). Karena akuntabilitas sangat kompleks, maka perlu untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa, mengapa, dan dengan sarana apa serta mengidentifikasi jenis akuntabilitas. Walaupun sangat kompleks, namun terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik (Jones dan Maurice 1996 dalam (Adi A.S, 2011).

Stewart, 1984 (H. B. Darwanis, 2016) menyatakan bahwa ada lima basis akuntabilitas sebagai standar penilaian akuntabilitas, yaitu: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan.

Mardiasmo, 2009 dalam (Safkaur, Afiah, Poulus, & Dahlan, 2019) menyatakan akuntabilitas terdiri dari dua yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja

(Moeheriono, 2014) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. (Mangkunegara, 2017) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Indikator kinerja menurut (Mahmudi, 2013) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data penelitian berupa data primer. Instrumen penelitian berupa kuisioner. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Sampel penelitian berjumlah 35 orang. Teknik pengambilan sampel adalah *non probability sampling* dengan metode

sensus, yaitu metode pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). Data penelitian dianalisis menggunakan model *regresi sederhana* yang didahului oleh uji prasyarat berupa *uji linearitas* dan *normalitas*. Persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 = Konstanta
 = Koefisien Regresi
 X = Kualitas Laporan Keuangan
 Error

Hipotesis penelitian ini adalah :

$H_0 : \mu = 0$ Tidak ada pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

$H_1 : \mu$ Kabupaten Buton
 Ada pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini melalui tahapan validitas dan reliabilitas. Uji validitas merupakan suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Uji reliabilitas adalah uji derajat ketepatan, ketelitian, keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Nilai Validitas Dan Reliabilitas Instrumen

Item Pernyataan	Variabel			
	Kualitas Laporan Keuangan		Akuntabilitas Kinerja	
	R	<i>Alpa croncbach</i>	R	<i>Alpa croncbach</i>
1	711	0,858	911	0,876
2	745		908	
3	726		682	
4	457		476	
5	722		602	
6	860		704	
7	532		746	
8	725		754	
9	463		390	
10	654		726	

Sumber : Data primer diolah, 2020

Syarat minimum untuk dianggap valid apabila $r > 0,3$. Jika koefisien korelasi kurang dari 0,3, maka butir instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Untuk reabilitas instrumen didasarkan pada

nilai *alpa croncbach*. Syarat minimum untuk suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *alpa croncbach* $> 0,7$ (Wati, 2018).

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa untuk keseluruhan item pernyataan 1 - 10 mengenai kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja memiliki nilai r 0,3 dan nilai reliabilitas keduanya $> 0,7$ sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan pada penelitian ini valid dan reliabel.

Uji Linearitas dan Normalitas

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dilakukan uji linearitas dan normalitas terhadap data penelitian. Hasil uji linearitas dan normalitas data dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2
Rekapitulasi Hasil Uji Linearitas Normalitas Data Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Variabel	Linearitas (Deviation from linearity)		Normalitas	
	Sig.		Sig.	
Kualitas Laporan Keuangan	0,076	0,05	0,082	0,05
Akuntabilitas Kinerja			0,313	

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai signifikansi (*Deviation from linearity*) yang diperoleh sebesar 0,07 $>$ sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki hubungan linear secara signifikan.

Selanjutnya dari hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh untuk data kualitas laporan keuangan sebesar 0,082 dan untuk data akuntabilitas kinerja diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,313. Oleh karena nilai signifikansi dari kedua data yang diperoleh $>$ sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Karena data pada penelitian memenuhi syarat linearitas dan normalitas, maka selanjutnya dilakukan uji regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap

akuntabilitas kinerja pada BPKAD Kabupaten Buton.

Uji Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil uji prasyarat yang dilakukan diketahui bahwa data pada penelitian ini memenuhi syarat linearitas dan normalitas, maka selanjutnya dilakukan uji regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi yang diperoleh $<$ sama dengan 0,05 maka kesimpulan H_1 diterima dan H_0 ditolak dan sebaliknya jika nilai signifikansi yang diperoleh $>$ sama dengan 0,05 maka kesimpulan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil uji hipotesis statistik penelitian dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Model		R	R Square (R ²)	Adjusted R Square	Unstandarized Coeficient B	Sig
1	Regression Constan X	.968 ^a	0,938	.936	.341 .999	0,000

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai korelasi hubungan (R) yaitu sebesar 0,968. Dari hasil output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,938 yang berarti bahwa pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap variabel terikat akuntabilitas kinerja sebesar 93%. Jika nilai pada tabel 3 dimasukkan dalam persamaan regresi maka diperoleh :

$$Y = 0,341 + 0,999X$$

Dari persamaan tersebut diketahui nilai konstanta sebesar 0,341 artinya jika kualitas laporan keuangan konstan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,341 Koefisien Regresi kualitas laporan keuangan sebesar 0,999 menyatakan bahwa setiap 1 kenaikan kualitas laporan keuangan maka akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton akan meningkat sebesar 0,999.

Untuk nilai R (korelasi) kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja yang diperoleh sebesar 0,968, dan untuk nilai koefisien determinasi (R² / R Square) diperoleh nilai sebesar 0,938 yang berarti bahwa pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton sebesar 93,8% dan 6,4 % sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Hasil uji regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < sama

dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima dan H₀ ditolak. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Sakti & Masitoh, 2018) bahwa laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai, (Silalahi & Sinambela, 2017) bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas pemerintah Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan maka akan semakin menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintahan. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja dapat diukur dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan pula dengan (Basri & Nabihah, 2014) bahwa laporan keuangan yang tepat telah menjadi komponen kunci dimana akuntabilitas dapat ditunjukkan, dan melalui laporan keuangan stakeholders dapat melakukan penilaian terhadap kinerja suatu instansi/organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi dan merupakan syarat terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Berdasarkan PP

No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi unsur-unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan daerah akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika laporan keuangan tersebut mendapatkan opini selain WTP maka dapat dikatakan kualitas dari laporan keuangan masih belum maksimal dikarenakan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan baik dan benar. Jika standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja suatu instansi hendaknya dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban. Laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan karena laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan guna melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih baik dan maksimal (Pratiwi & Setyowati, 2017). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Safkaur et al., 2019) bahwa laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban utama pemerintah kepada masyarakat umum juga parlemen harus memberikan informasi yang jelas sebagai bentuk representasi dari kinerja yang dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan kesimpulan penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Artinya bahwa baik tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menunjukkan baik tidaknya pula akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang tidak hanya berfokus pada kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja tetapi dapat pula dikembangkan ke variabel lain yang belum diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi A.S. (2011). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Mengerek Responsi dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Suatu Keniscayaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 134–146. <https://doi.org/10.14710/jaa.v7i2.4682>
- Basri, H., & Nabiha, A. K. S. (2014). *Accountability Of Local Government : The Case of Aceh Province, Indonesia*. 3(December), 1–14.
- Darwanis, H. B. (2016). *Analisis Akuntabilitas Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh*. 9(2), 105–110.
- Darwanis, S. C. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 150–174.
- Dwi Afriyanti, Harpanto Guno Sabanu,

- dan F. N. (2015). *Penilaian indeks akuntabilitas instansi pemerintah*. 21–42.
- Halim dan Kusufi. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hans Kartikahadi et al. (2012). *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Busniess, Accounting and Management*, 2, 82–90.
- husaini, lucy aditya, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Akuntansi Dan Manajemen, Volume 3*, (1), 21–41.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 9–30.
- Kurniawati, M. M. H. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah , Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah , dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember) The*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Mangkunegara, A. (2017). *Evaluasi Kinerja SDM*. Jawa Barat: REFIKA ADITAMA.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Keuangan Dasar 1*. Yogyakarta: BPFE.
- Moehariono. (2014). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Editama.
- Pratiwi, R. D., & Setyowati, L. (2017). Determinan yang Mempengaruhi Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 94–102.
- Safkaur, O., Afiah, N. N., Poulus, S., & Dahlan, M. (2019). the Effect of Quality Financial Reporting on Good Governance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 277–286.
<https://doi.org/10.32479/ijefi.8047>
- Sakti, F., & Masitoh, S. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pendidikan*. 8(2), 156–170. Retrieved from
<file:///C:/Users/ACER/Downloads/3749-9772-1-SM.pdf>
- Silalahi, T., & Sinambela, S. (2017). Determinants of Financial Report Accountability, and It'S Implication on Financial Report Quality an Empirical Study of Financial Report Statement in North Sumatra Province, Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, 3(3), 159–172. Retrieved from
<http://ijecm.co.uk/>
- Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (p. 11). p. 11. Retrieved from
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Toto Prihadi. (2013). *Analisis laporan keuangan : teori dan aplikasi*. Jakarta: PPM.
- www.dpr.go.id. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249.

Retrieved from
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

PROFIL SINGKAT

Nining Asniar Ridzal, Lahir di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 25 Maret 1984. Pendidikan Terakhir Pascasarjana Program Studi Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi dari Universitas Halu Oleo Kendari, lulus tahun 2016. Saat ini sebagai Dosen tetap Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Buton.